

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor ini merupakan gambaran tentang pencapaian kinerja yang diraih, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Laporan ini disusun berdasarkan pada kegiatan dari Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan, Bidang Promosi Kemitraan dan Perdagangan Jasa, Bidang Tertib Niaga dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Tahun 2019.

Tentunya kami menyadari bahwa apa yang terdapat dalam laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami membuka diri kepada semua pihak untuk menyampaikan kritik dan saran demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan sarana untuk peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

Bogor,

Juni 2020

Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Begor

GANJAR GUNAVAN, A.P.
Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTAR	. i
DAFTAR	ISI	. ii
BAB I PI	ENDAHULUAN	
1.	Hal-hal Umum Tentang Organisasi	1
2.	Gambaran Umum Tupoksi	2
3.	Tugas dan Fungsi	14
4.	Isu-Isu Strategis	14
BAB II PI	ERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
1.	Rencana Strategis	17
2.	Tujuan, Sasaran dan Strategis	17
3.	Perjanjian Kinerja	21
BAB III A	KUNTABILITAS KINERJA	
1.	Akuntabilitas Kinerja2	29
2.	Akuntabilitas Keuangan	30
RARIVE	PENIITIID	33

BAB I

PENDAHULUAN

1. HAL-HAL UMUM TENTANG ORGANISASI

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018) serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 101 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

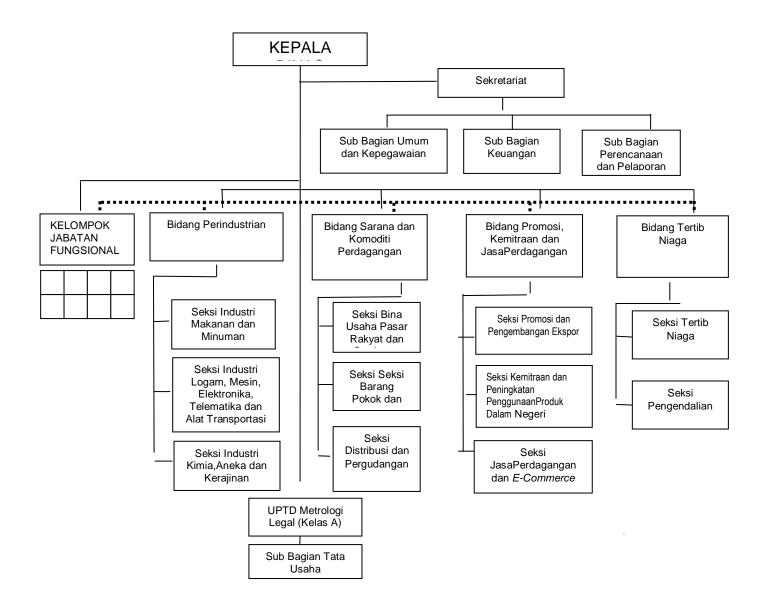
2. GAMBARAN UMUM TUPOKSI

Adapun Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Keuangan
 - c. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
- 3. Bidang Perindustrian membawahkan:
 - a. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi;
 - c. Seksi Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan;
- 4. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan membawahkan:
 - a. Seksi Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan;
 - b. Seksi Barang Pokok dan Barang Penting;
 - c. Seksi Distribusi dan Pergudangan;
- 5. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan membawahkan:
 - a. Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
 - b. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN);
 - c. Seksi JasaPerdagangan dan E-Commerce;

- 6. Bidang Tertib Niaga membawahkan:
 - a. Seksi Tertib Niaga;
 - b. Seksi Pengendalian;
- 7. UPTD Metrologi Legal kelas A membawahkan:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Bogor sebagai berikut :



Sedangkan uraian tugas jabatan struktural berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 101 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas; mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan, Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan, Bidang Tertib Niaga serta UPTD Metrologi Legal Kelas A, merumuskan rencana strategis dan rencana kerja serta kebijakan teknis, mengkoordinasikan Kewenangan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Walikota.
- 2. Sekretariat; Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat ini membawahkan:

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk

- melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a) pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b) Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c) pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- **2) Sub Bagian Keuangan;** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
 - b) pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
 - c) penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan Dinas;
 - d) pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariatdi bidang perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan rencana kerja lingkup Dinas;
 - b) pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi;
 - c) pengelolaan administrasi perencanaan monitoring dan evaluasi;

- d) pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup Dinas.
- 3. Bidang Perindustrian; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perindustrian. Untuk melaksanakan tugasBidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Perindustrian ini membawahkan:

- 1) Seksi Industri Makanan dan Minuman; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang perindustrian di bidang industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai fungsi:
- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Industri Makanan dan Minuman;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan Industri Makanan dan Minuman;
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Industri Makanan dan Minuman.
- 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai Tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang perindustrian di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi. Untuk melaksanakan tugas

- Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi mempunyai fungsi:
- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Industri Non Agro (Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi);
- b) penyiapan bahan pelaksanaan Industri Non Agro (Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi);
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Industri Non Agro (Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi)
- 3) Seksi Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang perindustrian di bidang Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Industri Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Industri Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan Industri Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan;
 - c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Industri Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan.
- 4. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan. Untuk melaksanakan Tugas Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan ini membawahkan:

- 1) Seksi Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai Tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan di Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan;
 - c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan.
- 2) Seksi Barang Pokok dan Barang Penting; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Barang Pokok dan Barang Penting di Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan. Untuk melaksanakan Seksi Barang Pokok dan Barang Penting mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Barang Pokok dan Barang Penting;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Barang Pokok dan Barang Penting;

- c) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Barang Pokok dan Barang Penting.
- 3) Seksi Distribusi dan Pergudangan; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan di bidang Distribusi dan Pergudangan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Distribusi dan Pergudangan mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Distribusi dan Pergudangan;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Distribusi dan Pergudangan;
 - c) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Distribusi dan Pergudangan.
- 5. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidangPromosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan ini membawahkan:
 - 1) Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangmempunyai tugas melaksanakan

- sebagian fungsi bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan di bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor. Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi:
- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Promosi dan Pengembangan Ekspor;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pengembangan Ekspor;
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Promosi dan Pengembangan Ekspor.
- 2) Seksi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN); dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan di bidang Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN). Untuk melaksanakan tugas Seksi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN);
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN);
 - c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN).
- 3) Seksi Jasa Perdagangan dan E-Commerce; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan dan E-Commerce di bidang Jasa Perdagangan. Untuk

- melaksanakan tugas, Seksi Jasa Perdagangan dan *E-Commerce* mempunyai fungsi:
- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Jasa Perdagangan dan *E-Commerce*;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Jasa Perdagangan dan *E-Commerce*;
- c) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Jasa Perdagangan dan *E-Commerce*.
- 6. Bidang Tertib Niaga; dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Tertib Niaga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tertib Niaga:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Tertib Niaga;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di Tertib Niaga;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Tertib Niaga ini membawahkan:

- 1) **Seksi Tertib Niaga;** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Tertib Niaga di bidang Tertib Niaga. Untuk melaksanakan tugas Seksi Tertib Niaga mempunyai fungsi:
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Tertib Niaga;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Tertib Niaga;
 - c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tertib Niaga.
- 2) **Seksi Pengendalian;** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

- fungsi bidang Pengendaliandi bidang Tertib Niaga. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengendalian mempunyai fungsi:
- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengendalian;
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Kelas A; dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang metrologi legal. Untukmenyelenggarakan tugas Kepala UPTD Metrologi Legal Kelas A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi Legal Kelas A;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Metrologi Legal Kelas A;
- c. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana metrologi legal;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

UPTD Metrologi Legal Kelas A ini membawahkan:

1) Sub Bagian Tata Usaha; dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Metrologi Legal Kelas A di bidang umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan data. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a) pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b) pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- c) pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional; dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana di atas , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

4. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

a. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan:

- 1. Kurangnya pangsa pasar atas produk ekspor dan belum optimalnya kerjasama perdagangan Internasional;
- 2. Kontinuitas pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- Belum terbinanya dengan optimal jaringan distribusi barang yang masuk ke Kota Bogor karena sulitnya mendapatkan informasi dari pelaku usaha;
- 4. Minimnya kesadaran Pelaku Usaha dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Urusan Perindustrian, menghadapi permasalahan:

- Lemahnya daya saing produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menghadapi dampak perdagangan bebas di era globalisasi.;
- 2. Minimnya kesadaran Pelaku Usaha untuk menjalin dan menjaga komunikasi terkait perkembangan usahanya;
- 3. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
- 4. Rendahnya Pola Pikir para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berorientasi pada produk berStandar Nasional Indonesia (SNI) dan berstandar internasional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2015-2019, Kota Bogor menetapkan visi yang lebih terfokus dan terarah.

Visi: "Menjadikan Bogor sebagai Kota yang nyaman beriman dan transparan"

Misi:

- 1. Menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2. Menjadikan Bogor Kota yang sehat dan makmur;
- 3. Menjadikan Bogor Kota yang berwawasan lingkungan;
- 4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- 5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;
- 6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor menjadi bagian dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan masuk ke dalam Misi kedua dalam Misi Kota Bogor, yaitu Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan Makmur. Untuk mencapai Misi tersebut ditetapkan **tujuan** adalah Terwujudnya stabilitas perekonomian dengan **sasaran** meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan indikator sasarannya Pertumbuhan komoditi ekspor.

1. RENCANA STRATEGIS

Potensi dan sumber daya yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, sesuai dengan Visi dan Misinya diharapkan dapat digunakan secara sinerjik berdaya guna dan berhasil guna untuk membangun dan mengembangkan pembangunan sektor Industri dan sektor Perdagangan Kota Bogor. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor 2015-2019 adalah:

Visi:

"Terwujudnya Industri dan Perdagangan Yang Berdaya Saing dan Berkualitas".

Misi:

- 1. Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah Yang Berkualitas;
- 2. Mewujudkan Perdagangan yang Efisien dan Berkelanjutan;
- Mewujudkan Kinerja Pelayanan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

> Tujuan:

Berdasarkan pada misi tersebut diatas maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah yang Memenuhi Standar; dengan indikatornya adalah:
 - 1. Prosentase Produk IKM yang bersertifikat Halal, HKI (Hak Kekayaan Intelektual dan SNI)
- 2. Terwujudnya pertumbuhan,penguatan dan stabilitas pasar dalam negeri; dengan indikatornya adalah:
 - 1. Prosentase Stabilitas pasar dalam negeri;
- 3. Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan pasar luar negeri.
 - 1. Prosentase pertumbuhan penguatan pasar luar negeri.

> Sasaran dan Indikator Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan dalam rencana strategis. Untuk mencapai 3 (tiga) tujuan di atas, sasaran yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor berikut dengan indikator sasarannya adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah yang memenuhi standar:
 - a. Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Persentase IKM yang menggunakan teknologi;

- c. Prosentase IKM yang sudah berizin.
- 2. Meningkat nya produk IKM yang memenuhi standar industri:
 - a. Prosentase jenis produk IKM yang memiliki sertifikat.
- 3. Meningkatnya pemasaran produk lokal di pasar dalam negeri
 - a. prosentase Industri Kecil dan Menengah yang telah bermitra dengan pelaku usaha besar;
 - b. Prosentase Industri Kecil dan Menengah telah memasuki pasar Nasional.
- 4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan sarana perdagangan dengan indikator sasarannya adalah Prosentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sarana perdagangan.
- 5. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha perdagangan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen:
 - a. prosentase pelaku usaha yang memenuhi perizinan;
 - b. prosentase jumlah UTTP yang sudah ditera;
 - c. Prosentase peredaran UTTP yang sesuai standar.
- 6. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting dengan indikatorn sasarannya adalah prosentase ratarata kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap harga acuan.
- 7. Meningkat nya nilai ekspor komoditas non migas:
 - a. Prosentase Nilai Realisasi Ekspor Non Migas;
 - b. Prosentase pertumbuhan jumlah Komoditi Ekspor Non Migas.

8. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas , dengan indikator sasarannya adalah Penilaian AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

> Strategi:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor menetapkan strategi untuk menetapkan sasaran, sebagai berikut :

- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku industri sehingga tercipta industi yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing;
- 2. Peningkatan pelayanan masyarakat yang berorientasi kepada peningkatan teknologi;
- 3. Peningkatan penyebarluasan informasi produk dan potensi pasar dalam negeri;
- 4. Pembangunan, revitalisasi dan pembinaan usaha sarana perdagangan;
- 5. Pembinaan perlindungan konsumen melalui pengendalian barang beredar dan standarisasi alat ukur;
- 6. Peningkatkan pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya dengan jaringan distribusi barang/jasa untuk menciptakan stabilitas harga;
- 7. Peningkatan pengembangan produk berorientasi ekspor dan perluasan pasar luar negeri;
- 8. Optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- > Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas produk industri serta mengembangkan industri;
- 2. Penegakan pelayanan masyarakat;
- 3. Peningkatan kampanye penggunaan produk dalam negeri melalui kontuinitas sosialisasi, promosi dan kemitraan dengan usaha menengah dan besar;
- 4. Penerapan standarisasi, perencanaan dan bina usaha penyelenggaraan sarana perdagangan;
- 5. Menjamin perlindungan konsumen melalui standarisasi alat ukur dan pengendalian standar barang beredar;
- 6. Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya serta meningkatkan kerja sama dengan jaringan distribusi dan barang;
- 7. Peningkatan efektifitas promosi, akses pasar dan produktivitas eksportir dan/atau calon eksportir;
- 8. Pelaporan tepat waktu , efektif, efisien, transparan dan akuntabel .

3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Dengan sasaran *Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah* yang memenuhi standar dengan **indikator sasaran**:
 - a) Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah,
 dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pemetaan Perkembangan Sektor Industri di Kota Bogor (berbentuk WEB);
- Peningkatan daya saing produk IKM;
- b) Persentase IKM yang menggunakan teknologi, yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Kemampuan Teknologi dengan kegiatan Penerapan dan Pengembangan Teknologi.
- c) Prosentase IKM yang sudah berizin, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)
 - Pemberdayaan Rumah Kemasan
- 2. Dengan sasaran *Meningkat nya produk IKM yang memenuhi* standar industri, dengan **indikator sasarannya** adalah:
 - a) Prosentase jenis produk IKM yang memiliki sertifikat yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Sistem Jaminan Halal bagi IKM;
 - Penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bagi IKM.
- 3. Sasaran *Meningkatnya pemasaran produk lokal di pasar dalam negeri*, dengan **indikator sasarannya** sebagai berikut:
 - a) Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang telah bermitra dengan pelaku usaha besar; melalui program

peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan kegiatan:

- Peningkatan Produk Dalam Negeri;
- Fasilitas Kemitraan Perdagangan antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah.
- b) Prosentase Industri Kecil dan Menengah telah memasuki pasar Nasional, melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui kegiatan
 - Buku Klasifikasi IKM Kuliner Kota Bogor Berdasarkan
 Orientasi Pasar
- c) Prosentase pelaku usaha Kota Bogor yang telah melaksanakan TPMSE,melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan Penyusunan database jasa bidang perdagangan
- 4. Sasaran Meningkatnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan sarana perdagangan dengan indikator sasarannya adalah:
 - a) Prosentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sarana perdagangan melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan :
 - Pengembangan Pembangunan Pasar
 - Pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan swalayan
 - Pembinaan pelaku usaha dan monitoring gudang dan
 - Pembinaan pelaku usaha dan monitoring sistem distribusi

- 5. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha perdagangan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen, dengan **indikator sasarannya**:
 - a). Prosentase pelaku usaha yang memenuhi perizinan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang di dukung dengan kegiatan:
 - Sosialisasi kebijakan dan pengawasan bidang perdagangan jasa;
 - Penyusunan database jasa bidang perdagangan.
 - b) Prosentase jumlah UTTP yang sudah diteradilaksanakan melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan dukungan kegiatan:
 - Peningkatan pemahaman metrologi legal
 - Akses pendataan dan database potensi UTTP di Kota Bogor berbasis teknologi informasi (e-metrologi)
 - Sosialisasi tertib niaga di bidang perdagangan
 - Pendataan tertib niaga, pendataan dan ukur ulang SPBU
 - Pendataan dan ukur ulang Gas LPG
 - Pengendalian UTTP, BDKT dan SI
 - c) Prosentase peredaran UTTP yang sesuai standar dengan program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan:
 - Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP
 - Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium dan pemeliharaan

- 6. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting dengan **indikator sasarannya** adalah
 - a) prosentase rata-rata kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap harga acuan, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri dengan kegiatan;
 - Pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya;
 - Operasi Pasar Murah kepokmas
- 7. Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas di program peningkatan pengembangan ekspor, dengan **indikator** sasarannya adalah:
 - a) Prosentase Nilai Realisasi Ekspor Non Migas dicapai melalui kegiatan :
 - Peningkatan kemampuan pelaku usaha (ekspor dan calon eksportir)
 - Forum bisnis eksportir, calon eksportir dengan stakeholder.
 - b) Prosentase pertumbuhan jumlah Komoditi Ekspor Non Migas , dicapai melalui kegiatan :
 - Promosi produk unggulan IKM Kota Bogor.
- 8. Sasaran *Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas* dengan **indikator sasarannya** adalah:

- a). Penilaian AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dicapai melalui Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung dengan kegiatan:
 - Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
 - Pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor
- b).Pemenuhan kebutuhan dasar operasional dan dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang didukung dengan kegiatan:
 - Pengadaan Inventaris Kantor
 - Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
 - Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

TABEL PERJANJIAN KINERJA

	PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN								
	1 2								
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
1	Peningkatan daya saing produk ikm	85.270.250,00							
2	Pemberdayaan rumah kemasan	139.140.000,00							
3	Penerapan gugus kendali mutu (gkm)	8.308.000,00							
4	Pemetaan perkembangan sector industry di Kota bogor (berbentuk web)	66.600.000,00							
Pro	gram Kemampuan Teknologi								
1	Penerapan dan Pengembangan teknologi	27.500.000,00							
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									
1	Sosialisasi tertib niaga di bidang perdagangan	22.220.000,00							
2	Peningkatan pemahaman metrologi legal	31.250.000,00							

3	Pendataan dan ukur ulang spbu dan gas elpiji	47.300.000,00
4	Pelayanan tera tera ulang UTTP	
5	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium dan pemeliharaaan	261.000.000,00
6	Penyusunan DED Gedung Tangki ukur Mobil (TUM) dan Alat dan perlengkapannya	111.000.000,00
	GEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA : CIL DAN MENENGAH	BAGI USAHA MIKRO
1	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dekranasda	288.128.030,00
Prog	gram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dal	lam Negeri
1	Pemantauan dan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis lainnya dan operasi pasar	125.000.000,00
2	Kajian toko swalayan	60.000.000,00
3	Pelatihan manajemen logistik, gudang dan distribusi	26.250.000,00
4	Penyusunan data base jasa di bidang perdagangan	66.600.000,00
5	Identifikasi pelaku usaha E-commerce/ TPMSE	25.355.000,00
6	Penyusunan buku klarifikasi ikm (industri kecil dan menengah) kuliner	50.000.000,00
7	Pembinaa pelaku usaha pasar rakayat dan swalayan	18.182.000,00
8	Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN)	116.400.000,00
9	Fasilitasi kemitraan perdagangan antar pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah	8.235.000,00
10	Revitalisasi/Pembangunan Showroom Bogor Craft Center	1.500.000.000,00
11	Penyusunan Rencana Penataan Pasar Rakyat	208.800.000,00
Prog	gram Peningkatan dan Pengembangan Ekspo	or
1	Forum Bisnis antar eksportir/calon eksportir	25.560.000,00

2	Promosi Produk Berorientasi Ekspor	200.000.000,00
3	Fasilitas informasi dan akses pasar ekspor	23.820.000,00
4	Pengembangan produk dan merk dagang (Rebranding) bagi produk berorientasi ekspor.	70.800.000,00
Prog	gram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	C
1.	Sistem Jaminan Halal Produk IKM	61.887.500,00
2.	Penerapan HKI bagi IKM	54.950.000,00
Prog	gram Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa	aratur
1	Pengadaan Inventaris Kantor	383.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	410.357.035,00
Prog	gram Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Pengelolaan Rumah Tangga PD	2.459.919.750,00
_	gram Pengembangan Sistem Pelaporan Capa angan	aian Kinerja dan
1	Penyusunan perencanaan dan pelaporan PD	15.920.000,00
2	Evaluasi penilaian dan pelaporan (hibah/bansos/rtlh)	1.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. AKUNTABILITAS KINERJA

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN TAHUN	%	CAPAIAN TAHUN	%	Kenaikan/ Penurunan	KET.
				2019		2018			
1.	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah yang memenuhi standard	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	7,5	30,3	300	1000 IKM	0	Terjadi kenaikan	Ada kenaikan dari 1000 IKM menjadi 1303 IKM
		Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menggunakan teknologi	2	2	100	2	100	tetap	
		Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sudah berizin	2,7	2,86	100	2,7	100	Terjadi kenaikan	
2.	Meningkatnya produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memenuhi standar	Presentase jenis produk IKM yang memiliki sertifikat	5	5,29	65%	5	100	Terjadi kenaikan	

	industri								
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	%	CAPAIAN TAHUN 2018	%	Kenaikan/ Penurunan	КЕТ.
3.	Meningkatnya pemasaran produk lokal di pasar dalam negeri	Persentase IKM yang telah bermitra dengan pelaku usaha besar	2,7	11,8		2,7	100	Terjadi kenaikan	Banyak IKM yang telah bermitra dengan Retail Besar
		Persentase IKM yang telah memasuki pasar nasional	7	7	100	6		Terjadi kenaikan	Adanya keikutsertaan para IKM dalam mengikuti event Nasional
4.	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan sarana perdagangan	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sarana perdagangan	30	51,5	100	30		Terjadi Kenaikan	Meningkatnya toko swalayan yang mendapatkan rekomendasi
5.	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha perdagangan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen	Persentase pelaku usaha yang memenuhi perizinan	2	7,21	100	2	100	Terjadi Kenaikan	

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	%	CAPAIAN TAHUN 2018	%	Kenaikan/ Penurunan	КЕТ.
		Persentase jumlah UTTP yang sudah ditera	75	68,2	100	75	100	Terjadi Penurunan	Masa berlaku alat untuk di tera tidak sama
		Persentase peredaran UTTP yang sesuai standar	85	68,2	100	85		Terjadi penurunan	
6.	Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting	kenaikan harga kebutuhan	8	8	100	8	100	Tetap	
7.	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas		2	-3,63	100	2		Turun	Untuk angka realisasi ekspor Kota Bogor tahun 2019 sebesar usd 95.671.969.07, turun sekitar 3.63% atau sekitar usd 3.609.555.56 dari tahun 2018 yang mencapai angka sebesar usd 99.283.771.63, dikarenakan adanya penurunan nilai ekpor yang signifikan dari komoditi ban.

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	%	CAPAIAN TAHUN 2018	%	Kenaikan/ Penurunan	КЕТ.
		Persentase pertumbuhan jumlah komoditi ekspor non migas	2	2	100	2	100%	Tetap	-
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penilaian AKIP Dinas	ВВ	-	1	BB	100%	-	belum bisa disajikan dikarenakan penilaian atas LAKIP tahun 2019 Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan Nilai BB (72,16).

Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor seperti yang tercantum pada matrix di atas, dapat di jabarkan sebagai berikut;

Sasaran 1 Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah yang memenuhi standard

Tabel 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Satuan
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0	%
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menggunakan teknologi	2	%
3	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sudah berizin	2,7	%

Indikator sasaran yang pertama adalah Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah dimana dalam Pelaksanaan program ini, didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Rumah Kemasan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membekali para pelaku IKM melalui pelatihan manajemen dalam mengelola usaha serta memberikan pelatihan membuat kemasan yang baik dan menarik, melalui:

a. Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan Pangan bagi 40 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang produktif di kota bogor, bertempat di aula rumah kemasan pelaksanaan pelatihan pengembangan desain kemasan di selenggarakan pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2019 dengan pemateri Tim dari Industri Pangan, Olahan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Diharapkan dengan pelaksanaan pelatihan ini dapat memotivasi dan menambah pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kemasan produknya sehingga dengan tidak mengeluarkan biaya produk yang tinggi tetapi dapat mempercantik produk kemasannya.

- b. Pelatihan Peningkatan Kemasan Pangan, pada lokasiBinaan :
 - 1) Lokasi Binaan Lomba Posyandu: Untuk meningkatkan pengetahuan tentang kemasan pangan kepada 20 IKM rumah tangga yang ada di Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor barat , dilaksanakan peatihan pada tanggal 19 september 2019 yang bertempat di aula Kelurahan dengan pembimbing dari IKM Kota Bogor yang kompeten di bidangnya (Renita Marianty dan Rizky Surya Diputra)
 - 2) Lokasi Binaan P2WKSS Untuk dapat bersaing dengan pelaku IKM lainnya yang ada di Kota Bogor, diadakan pelatihan peningkatan kemasan pangan di lokasi binaan P2WKSS di Kelurahan Tanah Baru pada 20 IKM rumah tangga, yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2019.
 - 3) Lokasi Binaan Lomba Kelurahan Untuk menunjang pelaksanaan lomba kleurahan tingkat Propinsi di

melaksanakan pelatihan peningkatan kemasan pangan di loaksi binaan di Kleurahan Cparigi Kecamatan Bogor Utara kepada 20 IKM Makanan Minuman, yang di pandu oleh owner iKM Kefi (Susu Sapi plain) / Ibu Renita M dan Owner IKM Putra Galungung (kentang Mustofa) Bp.Moch.Rizki yang berbagi ilmu bagaimana kemasan produk terlihat cantik, kegiatan ini laksanakan pada tanggal 25 Juni 2019.

4) Lokasi Binaan Lomba up2K-PKK Pelatihan di berikan kepada 20 IKM Makanan Minuman di Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat dalam rangka Lomba UP2K-PKK yang di pandu oleh owner iKM Kefi (Susu Sapi plain) / Ibu Renita M dan Owner IKM Putra Galungung (kentang Mustofa) Bp.Moch.Rizki yang berbagi ilmu bagaimana kemasan produk terlihat cantik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di aula Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat.

2. Peningkatan Daya Saing Produk IKM

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelatihan Olahan Pangan bagi 20 IKM Makanan Kota Bogor, dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Oktober 2019 bertempat Aula Rumah Kemasan Jalan Ceremai Ujung Nomor 202 Kota Bogor , dengan pelatihan pembuaatan berbagai macam sambal yang di pandu oleh IKM Grane Sambal .

- b. Melaksanakan lomba kreasi cipta menu olahan pangan dari ikan patin Tingkat Kota Bogor yang di ikuti oleh TP.PKK dari 6 Kecamatan se Kota Bogor, pada tanggal 25 April 2019 bertempat di ruang rapat Paseban Sribima Balaikota Bogor, Juri penilai adalah Ketua TP PKK Kota Bogor, SN.Cake and Bakery, Chef Cahyadi, Chef Sabir dan Dyah Ayu Retnowati dengan hasil kejuaraan sebagai berikut: TP.PKK Bogor Timur Kecamatan Juara I. TP.PKK Kecamatan Bogor Tengah Juara II dan TP.PKK Kecamatan Bogor Barat Juara III, TP.PKK Kecamatan Bogor Selatan Juara Harapan I, TP.PKK Keamatan Tanah Sareal Juara 2 dan TP.PKK Kecamatan Bogor Utara sebagai Juara Harapan 3.
- c. Keikutsertaan dalam pameran Food Etnic Tingkat Propinsi Jawa Barat masih bertempat di Trans Mart Bandung Jl. Gatot Subroto No. 289, Cibangkong Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40273 pada tanggal 08 10 Agustus 2019 dengan tema yang diangkat adalah "Mengembangkan Diversifikasi Produk Olahan Pangan Berbasis Ikan", dimana Kota Bogor diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Bogor Timur .

3. Kegiatan pemetaan perkembangan sector industry di Kota Bogor (berbentuk WEB)

Maksud dilaksanakannya kegiatan adalah untuk tercapainya pemetaan sektor industri di Kota Bogor sehingga Informasi terhadap publik tentang sebaran industri di kota Bogor dapat di akses melalui Web IKM (Indutri Kecil dan Menengah) Kota Bogor yang terintegrasi dengan situs Disperindag di http://disperindag.kotabogor.go.id

Indikator sasaran yang kedua , yaitu Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menggunakan teknologi, dilaksanakan melalui Program Penerapan dan Pengembangan teknologi ini di jabarkan melalui Kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dimana Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan kepada 5 IKM dan mengikutsertakan 2 IKM hasil binaan yaitu; CV Nutrima madu (produk lebah dan madu) dan Karya Mitra Usaha Alsintan (alat mesin pertanian) pada pameran Gelar Teknologi di Manado Town Square pada tanggal 31 Juli – 3 Agustus 2019

Indikator sasaran yang ketiga, Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sudah berizin, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah dimana dalam Pelaksanaan program ini, didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)

Dalam rangka pemgembangan industri kecil dan menengah, dilaksanakan coaching clinic GKM pada tanggal 22-28 Nopember 2019 kepada 7 (tujuh) IKM di Kota Bogor yaitu: Aida Cake dan Cookies, Jitha Shoes, Batik Pancawati, Tyas Decoration, dan CV.Omocha, Souvenir Kujang, Maksud dari pelaksanaan Gugus Kendali Mutu ini adanya tumbuh kepedulian dan kebersamaan mengatasi masalah yang terjadi di samping adanya inovasi dan formulasi maupun proses produksi, modifikasi mesin peralatan.

Sasaran 2, Meningkatnya produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memenuhi standar industri: Tabel 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Satuan
1	Presentase jenis produk IKM yang	5	%
	memiliki sertifikat		

Untuk mendukung sasaran di atas dengan *Indikator Presentase* jenis produk IKM yang memiliki sertifikat , dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas Publik dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi IKM dalam Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mempunyai target 50 IKM dengan realisasi sebesar 30 IKM, jumlah produk yang tersertifikasi Haki dihasilkan dari kesadaran diri IKM untuk mendaftarkan Hakinya secara mandiri setelah diberikan sosialisasi tanpa bantuan/fasilitasi Dinas Perindag Kota Bogor dikarenakan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk bantuan/fasilitasi tersebut, sehingga di tahun 2019 lebih menitik beratkan kepada sosialisasi tentang Haki. Kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi IKM dilaksanakan beberapa periode yaitu pada bulan Maret, Juni, September, Oktober dan November.
- 2. Sistem Jaminan Halal bagi IKM dalam Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mempunyai target 100 IKM yang mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dengan realisasi 25 IKM yang menerima bantuan/fasilitasiSertifikasi Halal melalui kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat

yang sebelumnya di adakan audit halal oleh Tim Audit Halal dari LPPOM MUI Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 April 2019 dan pada tanggal 20 Agustus 2019 diserahkan sertifikat halal kepada 15 IKM dari Kota Bogor di Rumah Pengemasan Jalan Ceremai Ujung No.202 Kel. Bantar Jati Kec.Bogor Utara Kota melalui kegiatan Penerapan Sistem Jaminan Halal. Selain dari fasilitasi dari kota bogor, ada 10 IKM Kota Bogor yang mendapatkan langsung sertifikasi dari Indag Provinsi.

Sasaran 3, Meningkatnya Pemasaran Produk Lokal di Pasar Dalam Negeri

Tabel 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Satuan
1	Persentase IKM yang telah	2,7	%
	bermitra dengan pelaku usaha		
	besar		
2	Persentase IKM yang telah	6	%
	memasuki pasar nasional		

Untuk mendukung Sasaran 3, Meningkatnya pemasaran produk lokal di pasar dalam negeri dilakukan melalui 2(dua) indikator, yaitu:

Indikator Persentase IKM yang telah bermitra dengan pelaku usaha besar melalui Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, yang di dukung dengan beberapa kegiatan:

1. Fasilitasi kemitraan perdagangan anatar pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah Tahun 2019 dimana Disperindag Kota Bogor melaksanakan kegiatan kemitraan melalui pembiayaan APBD Kota Bogor tahun 2019, berupa kegiatan-kegiatan yang akan menciptakan potensi usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar, adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

a. Sosialisasi Fasilitasi Kemitraan dan Temu Usaha antara Pelaku
 Usaha Mikro & Kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar (toko swalayan dan pusat perkulakan)

Indikator Persentase IKM yang telah memasuki pasar nasional melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan beberapa kegiatan:

1. Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui promosi P2DN dengan Mengikuti Pameran Bergengsi bertaraf Internasional Inacraft melibatkan Dekranasda Kota Bogor, Mengikuti Pameran bertaraf Nasional Apeksi Melibatkan Dekranasda dan Bakul Bogor pada tanggal 1 Juli sd 7 Juli 2019, Mengikuti Pameran Bertaraf Nasional dalam rangka Harkopnas di Purwokerto pada tanggal 11-13 Juli 2019. Melibatkan Dekranasda dan Bakul Bogor, Mengikuti Pameran Bergengsi bertaraf Regional dalam rangka Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) melibatkan Dekranasda Kota Bogor, Mengikuti Pameran Bertaraf Nasional pada acara Makasar Expo di kota Makasar pada tanggal 6 Nopember sd 10 Nopember 2019 yang melibatkan Dekranasda dan Bakul Bogor.

2. Penyusunan Data base Jasa di Bidang Perdagangan

Database jasa dibidang perdagangan guna mengantisipasi perkembangan banyaknya jasa di bidang perdagangan yang belum teridentifikasi secara jelas dengan memanfaatkan regulasi teknis dengan tujuan memberikan arahan yang jelas dan tersedianya data pelaku usaha jasa di bidang perdagangan. Identifikasi / Database jasa dibidang perdagangan Tahun 2019 sebagai acuan klasifikasi jasa apa saja yang akan di identifikasi, sesuai koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI meliputi Jasa Bisnis (jasa perusahaan perantara perdagangan property dan jasa surveyors) dan Jasa Distribusi {(jasa retail, jasa keagenan, waralaba/frechise dan MLM (multi level marketing), jasa distribusi lebih di fokuskan ke waralaba / frenchise dan MLM (multi level marketing). Berkaitan hal tersebut, sebagai langkah awal dalam mengatur jasa perdagangan di Kota Bogor. Hasilnya berupa Buku Laporan akhir penyusunan Identifikasi Database Jasa di Bidang Perdagangan di Kota Bogor yang berisi data pelaku usaha jasa di bidang perdagangan. Database dilakukan di Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal dengan hasil terdapat 179 pelaku usaha jasa di bidang perdagangan, yaitu:

- a. Jasa Distribusi 56 pelaku usaha
- b. Jasa Bisnis 123 pelaku usaha

3. Kegiatan Identifikasi pelaku usaha e-commerce/TPMSE Di Kota Bogor Tahun 2019

sebagai gambaran untuk mengetahui jumlah pelaku usaha IKM di Kota Bogor yang telah mengaplikasikan market place bertujuan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang telah telah terjun dalam dunia ekonomi digital atau e-commerce

sehingga menjadi, sebuah dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembinaan para pelaku usaha di Kota Bogor khususnya melalui fasilitas e-commerce/TPMSE di Kota Bogor. Data pelaku usaha yang telah masuk dalam market place /ecommerce ini bekerjasama dengan Bukapalak.com (hanya Bukalapak yang memberikan data) yang berada di Kecamatan Bogor Timur sebagai lokasi pendataan berjumlah 153 pelaku usaha yang terdiri dari:

- a. 18 Jenis usaha produk makanan dan minuman
- b. 79 Jenis usaha di bidang Fashion
- c. 56 Jenis usaha di bidang lainnya
- 4. Kegiatan Penyusunan Buku Klasifikasi IKM (Industri Kecil dan Menengah) Kuliner Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemitraan perdagangan antara pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah. Sedangkan hasil dari Penyusunan buku ini adalah:
 - Terklasifikasinya IKM Kuliner Kota Bogor berdasarkan orientasi pasar dan booklet IKM kuliner Kota Bogor sebagai bahan bagi kegiatan promosi dalam negeri dan kemitraan;
 - Tersedianya IKM Kuliner Kota Bogor dan booklet IKM kuliner Kota Bogor untuk mendukung pelaksanaan kemitraan IKM bidang kuliner Kota Bogor dengan toko swalayan, hotel dan oulet kuliner di Kota Bogor
 - Sasaran 4, Meningkatnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan sarana perdagangan

Tabel 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Satuan
1	Persentase pembinaan dan	30	%
	pengawasan penyelenggaraan sarana		
	perdagangan		

Indikator Prosentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sarana perdagangan, melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan :

- Pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan swalayan dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi/pengawasan yang meliputi pembinaan secara langsung kepada 555 Toko Swalayan yang tersebar di Kota Bogor meliputi Mini Market, Pusat Perbelanjaan, Departement Store, Hypermarket, Supermarket, Perkulakan.
 - b. Setelah di lakukan pengawasan / pembinaan dapat terlihat toko swalayan yang sudah memiliki rekomendasi IUTS ataupun yg belum memiliki rekomendasi IUTS, sesuai data tabel berikut:
 - Toko Swalayan yang telah memiliki Rekomendasi IUTS sebanyak 255
 - Toko Swalayan yang belum memiliki Rekomendasi IUTS sebanyak 261
- 2. Kegiatan Kajian Toko Swalayan Dimaksudkan untuk menetapkan jumlah batasan toko swalayan terutama minimarket yang ada di Kota Bogor. Oleh karena itu dilaksanakan kegiatan kajian yang dihasilkan oleh konsultan meliputi: mengetahui jumlah dan sebaran minimarket

minimarkket dan kesesuaian lokasi di Kota Bogor, Tersedianya data toko swalayan sebagai dasar penyusunan perwali minimarket serta terkondisikannya keberadaan toko swalayan di Kota Bogor.

3. Kegiatan Pelatihan Manajemen Logistik, Gudang dan Distribusi Latar belakang diadakan kegiatan ini adalah menjadikan pengelolaan logistik yang efisien dan efektif yang akan membantu pelaku usaha untuk dapat lebih unggul dalam persaingan melalui penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi. Dikarenakan pergudangan bukan hanya memasukan barang dalam ruang penyimpanan, tetapi lebih dari itu penting dilakukan adanya suatu perencanaan, pengorganisasian serta pengendalian secara baik dan benar, Oleh sebab itu pada hari Senin tanggal 30 September 2019 bertempat di Rumah Kemasan dilaksanakan pelatihan kepada 30 Pelaku usaha gudang, distribusi dan agen serta kepada 15 Perangkat Daerah terkait.

Sasaran 5, Meningkatnya kesadaran pelaku usaha perdagangan terhadap regulasi dan perlindungan konsumen.

Tabel 5

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Satuan
1	Persentase pelaku usaha yang memenuhi perizinan	2	%
2	Persentase jumlah UTTP yang sudah ditera	75	%
3	Persentase peredaran UTTP yang sesuai standar	85	%

Indikator prosentase pelaku usaha yang memenuhi perizinan; melalui program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang di dukung dengan kegiatan :

- 1. Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Showroom Bogor Craft Center, mewujudkan bangunan yang sesuai dengan kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu dan menghasilkan karya konstruksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari kualitas, volume, biaya dan sisi ketepatan pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan kelengkapannya, dan Sehingga Kota Bogor Bangunan Gedung Craft Center yang dapat mewadahi para Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Bina Marga Bogor Timur.
- 2. Kegiatan Penyusunan Buku Klasifikasi IKM (Industri Kecil dan Menengah) Kuliner Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemitraan perdagangan antara pelaku usaha mikro kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah. Sedangkan hasil dari Penyusunan buku ini adalah:
 - Terklasifikasinya IKM Kuliner Kota Bogor berdasarkan orientasi pasar dan booklet IKM kuliner Kota Bogor sebagai bahan bagi kegiatan promosi dalam negeri dan kemitraan;
 - Tersedianya IKM Kuliner Kota Bogor dan booklet IKM kuliner Kota Bogor untuk mendukung pelaksanaan kemitraan IKM bidang kuliner Kota Bogor dengan toko swalayan, hotel dan oulet kuliner di Kota Bogor.

Indikator prosentase jumlah UTTP yang sudah ditera melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan dukungan kegiatan:

1. Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal

Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019 di Aula Rumah Kemasan Jalan Ceremai Ujung Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara, dengan perserta sebanyak 50 Orang yang terdiri dari perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta yang berada di Kota Bogor. Sosialisasi tersebut dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat memahami tentang kemetrologian yang menghasilkan 2 (dua) buku yang kiranya dapat menjadi tolok ukur .

- 2. Kegiatan Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP Pelaksanaan Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP dimulai dari Bulan Januari s.d Desember 2019, kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelayanan Sidang Tera/ Tera Ulang UTTP baik di kantor, Luar Kantor (Tempat Pakai , UTTP tertanam) serta pelayanan langsung pada 8 Pasar dan 6 Kecamatan di wilayah Kota Bogor. Adapun jumlah UTTP yang telah dilakukan baik Tera/ Tera Ulang pada tahun 2019 sebanyak 30.540.
- 3. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Standar ukuran dan labolatorium dan pemeliharaan dimulai dari Bulan Januari s.d Desember 2019, dengan Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain;

- a. Pengadaan Bahan Baku Pendukung Laboratorium Kemetrologian seperti kawat ulir biasa, kawat ulir tembaga, timah plombir, timah daun dan lemping ;
- Belanja pakaian kerja lapangan bagi tenaga kerja NON PNS -Belanja pemeliharaan untuk peralatan standar Kemetrologian milik UPTD Metrologi Legal Kota Bogor;
- c. Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi seperti 1 unit Timbangan Elektronik 16100 g, 1 unit Thermometer,1 unit Alat Penguji Meter Air Portable, 100 buah Anak Timbangan M2 Batu Bidur @20 Kg dan 1 set Anak Timbangan F2 50 g 1 Kg.
- 4. Kegiatan Penyusunan DED Gedung Tangki Ukur Mobil (TUM) Alat perlengkapannya, Kebutuhan dan Kegiatan dilaksanaan berkenaan telah diresmikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP di Kota Bogor, dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perihal Persetujuan Terhadap Peraturan WaliKota Bogor serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Perangkat tentang Pembentukan dan Susunan Daerah, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Metrologi Legal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2018, menjadikan semua aset dialihkan kepada Pemerintah Kota Bogor termasuk Instalasi TUM yang masih berada di Gedung pemerintah provinsi Jawa Barat sehingga harus di bongkar. Untuk itu di lakukan pelaksanaan DED gedung TUM di tahun 2019.

- 5. Sosialisasi Tertib Niaga di bidang perdagangan Pelaksanaan Sosialisasi Tertib Niaga bagi para pelaku usaha di bidang perdagangan diikuti oleh 40 peserta pelaku usaha se Kota Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 di Aula Rumah Kemasan Jalan Ceremai Ujung Kelurahan BantarJati Kecamatan Bogor Tengah.
- Indikator ketiga , Prosentase peredaran UTTP yang sesuai standar dengan program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan, yang dicapai melalui kegiatan:

1. Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG

Pendataan di lakukan untuk mengetahui data perusahaan SPBU di Kota Bogor, sasaran pendataan dan ukur ulang SPBU adalah 30 SPBU yang tersebar di Kota Bogor, tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan apakah takaran jumlah liter yang di keluarkan oleh mesin pompa SPBU tersebut sudah sesuai dengan takarannya. Berikut hasil Pendataan dan Ukur Ulang SPBU di 6 Kecamatan sebanyak 30 SPBU:

No	Lokasi	Jumlah SPBU yang di	Keterangan
		lakukan Ukur Ulang	
1	Kecamatan	4	Baik
	Tanah Sareal		
2	Kecamatan	9	Baik
	Bogor Barat		
3	Kecamatan	4	Baik
	Bogor Timur		
4	Kecamatan	2	Baik
	Bogor Tengah		
5	Kecamatan	7	Baik

	Bogor Utara		
6	Kecamatan	7	Baik
	Bogor Selatan		

Dari hasil pendataan dan ukur ulang ke 30 SPBU tersebut sudah memiliki perizinan dan hasil pengujian rata - rata "BAIK" dan masih dibawah toleransi yang diizinkan serta telah dianjurkan untuk lebih teliti pada alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam perdagangan serta pastikan juga bahwa UTTP transaksi tersebut sudah tertanda tera sah yang berlaku. Pendataan dilakukan untuk mengetahui data Pangkalan/Agen Gas LPG di Kota Bogor, setelah didata maka dilakukan ukur ulang terhadap 30 Pangkalan/Agen Gas LPG dilakukan pendataan dan ukur ulang terhadap 25 Tabung Gas yang dilakukan secara Random Sampling, hal ini dilaksakan untuk memastikan apakah isi bersih gas dalam tabung sudah sesuai dengan takarannya dan Ukurannya, Kecamatan sebanyak 111 Agen dan Pangkalan Gas sebagai berikut:

No	Lokasi	Jumlah Agen Gas LPG yang di lakukan Ukur Ulang	Keterangan
1	Kecamatan Tanah Sareal	18	Baik
2	Kecamatan Bogor Barat	21	Baik
3	Kecamatan Bogor Timur	13	Baik
4	Kecamatan Bogor Tengah	10	Baik
5	Kecamatan Bogor Utara	23	Baik

6	Kecamatan	Bogor	26	Baik
	Selatan			

Dari hasil ukur ulang Agen/Pangkalan Gas LPG di 6 Kecamatan rata-rata baik dan masih dalam batas toleransi, bahkan ada beberapa yang melebih kapasitas timbangan, hanya APAR belum di perpanjang masa berlakunya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan di pangkalan/agen.

3. Sasaran 6, Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting

Tabel 6

No		Indikator Kinerja			Realisasi	Satuan
1	Persentase			harga	8	%
	kebutuhan pokok terhadap harga acuan					

Indikator prosentase rata-rata kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap harga acuan, melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan;

1 Pemantauan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya;

a). Pada tahun 2019 kegiatan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan pemantauan harga dilakukan sebanyak 36 kali di 7 pasar tradisional (Pasar Kebon Kembang, Pasar Baru Bogor, Pasar Sukasari, Pasar Merdeka, Pasar GunungBatu, Pasar Padasuka, Jambu Dua) di Kota Bogor saat ini, dengan fokus pada 34 komoditi

kebutuhan pokok masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi harga bahan pokok kebutuhan masyarakat tiap minggunya dan menjelang harihari besar keagamaan/nasional dapat terpantau dengan baik, melalui web Kementrian Perdagangan RI.

b). Operasi Pasar murah dilaksanakan pada tanggal 20 – 25 Mei 2019 di 6 Kecamatan yang secara simbolis oleh Bapak Walikota Bogor di kecamatan Bogor Tengah. Jumlah Penerima Subsidi di Kota Bogor sebanyak 7.000 Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin, tuurn dari tahun sebelumnya terdiri dari :

Kecamatan Bogor Tengah : 672 KK RTM b Kecamatan Bogor Utara 1.126 KK RTM Kecamatan Bogor Selatan 1.827 KK RTM c Kecamatan Bogor Barat 1.525 KK RTM d : Kecamatan Tanah Saeral 1.271 KK RTM e 579 KK RTM f Kecamatan Bogor Timur

Jenis komoditas pada Operasi pasar murah yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Adapun komoditas tersebut terdiri dari Beras, 5 kg / KK RTM, Gula Pasir, 3 kg / KK RTM dan Minyak Goreng SNI, 3 liter / KK RTM .Adapun harga yang ditetapkan antara Pemerintah Kota Bogor (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor) dengan penyedia (Bulog Divisi Regional II Cianjur) adalah, sebagai berikut:

Tabel 5
Penetapan Harga Operasi Pasar

N	Harga	Jumlah	Harga Per	Subsidi	Harga
0	Penetapan	Paket	Paket		Tebus
					Masyarakat
1.	Beras,				
	Rp. 11.500,-/kg	5 kg	Rp.	Rp.	Rp.
			57.500,-	32.500,-	25.000,-
2.	Gula Pasir				
	Rp. 12.000,-/kg	3 kg	Rp.	Rp.	Rp.
			36.000,-	21.000,-	15.000,-
3.	Minyak Goreng				
	Rp. 12.000,-	3 liter	Rp.	Rp.	Rp.
	/liter		36.000,-	22.500,-	13.500,-
	JUMLAH	•	Rp.	Rp.	Rp.
			129.500,-	76.000,-	53.500,-

4. Sasaran 7, Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas Tabel 7

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Satuan
1	Persentase nilai realisasi ekspor non	2	%
	migas		
2	Persentase pertumbuhan jumlah	2	%
	komoditi ekspor non migas	2	70

Indikator Pertama , Prosentase Nilai Realisasi Ekspor Non Migas dengan Program Pengembangan Ekspor yang dicapai melalui kegiatan :

1. Kegiatan Forum Bisnis antar eksportir/calon eksportir Dalam rangka upaya peningkatan nilai realisasi ekspor di Kota Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Forum Bisnis antara eksportir / calon eksportir dengan Atase Perdagangan / Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) pada tanggal 23 Oktober 2019 di Hotel Pajajaran Suites Bogor Nirwana Residence , Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta dari perusahaan besar dan IKM Kota Bogor yang memiliki Produk berorientasi ekspor diantaranya: Rubber Sparepart, Furniture Olympic, Eco Bag, Mesin Pertanian, Osha Snack serta menghadirkan narasumber dari Atase Perdagangan Malaysia dan Indonesia Trade promootion Center (ITPC) Lagos dan Mexico.

- **2. Kegiatan Promosi produk berorientasi Ekspor** Kegiatan dilaksanakan melalui keikutsertaan Kota Bogor dalam pameran/promosi produk unggulan IKM, yang terdiri dari :
 - 1. Pameran INACRAFT Ke-21, diselenggarakan pada tanggal 24 sd 28 April 2019 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), pameran diikuti oleh 1700 peserta yang menempati 1400 booth tersebar di seluruh JCC. Kota Bogor menampilkan 7 produk unggulan IKM Kota Bogor yaitu: Kresna Handycraft, Monesh Plus, Bogor Woodcraft, Box Unik, Khabesana, Twist Rope dan My Zhee. Output dari keikutsertaan pada pameran Inacraft:
 - a. Dalam kegiatan ini Booth Kota Bogor mendapatkan respon positif dari pengunjung yang datang, hal ini dapat dilihat dari total penjualan selama 5 hari sebesar Rp. 13.625.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibeli secara retail. b. Tawaran kerjasama yang akan dijajagi pasca pameran untuk kelanjutan pemasaran produk, antara lain:

☐ Dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat untuk mengisi
galeri kerajinan di Jabar Craft Center dan Creative Club.
☐ Dari Dinas Pperindustrian dan Perdagangan Provinsi
Jawa Barat untuk membuat produk tempat HP dan Pen
Holder.
2. Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-34, diselenggarakan
pada tanggal 16 sd 20 Oktober 2019 bertempat di ICE BSD
Tangerang Selatan Banten dengan mengusung tema " Moving
Forward to Serve the World ". Dalam Pameran berskala
internasional ini Kota Bogor menampilkan IKM Kota Bogor
yang sudah memiliki kualitas ekspor yaitu :
☐ Batik Galish dengan potensial buyer dari Pataya, Jepang
dan Australia dan tawaran mengikuti pameran
dan Australia dan tawaran mengikuti pameran
dan Australia dan tawaran mengikuti pameran Internasional melalui KRJRI Melbourne, Mengisi outlet
dan Australia dan tawaran mengikuti pameran Internasional melalui KRJRI Melbourne, Mengisi outlet Indonesia di Kuching;
dan Australia dan tawaran mengikuti pameran Internasional melalui KRJRI Melbourne, Mengisi outlet Indonesia di Kuching; Tulip Craft potensial buyer dari Lock and Lock yang
dan Australia dan tawaran mengikuti pameran Internasional melalui KRJRI Melbourne, Mengisi outlet Indonesia di Kuching; □ Tulip Craft potensial buyer dari Lock and Lock yang ditindaklanjuti dengan penawaran system Co Branding

Indikator Kedua, Prosentase pertumbuhan jumlah Komoditi Ekspor Non Migas dengan Program Pengembangan Ekspor dicapai dengan kegiatan:

- Pengembangan Produk dan Merk Dagang (Rebranding) bagi
 Produk Berorietasi Ekspor, dilaksanakan melalui
 - a. Sosialisasi sekaligus pemilihan (kurasi) peserta pengembangan desain produk dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat

- /workshop IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebanyak 10 IKM, yang direncanakan pada bulan April 2019.
- b. Pendampingan desain bagi IKM yang terpilih serta mengikutsertakan dalam pameran produk TEI yang di fasilitasi oleh Kementrian Perdagangan.
- c. IKM yang mendapatkan program pendampingan desain CV.Lesung Keramik dan Bank Sampah Basiba, yang pada awalnya hanya dapat membuat produk sederhana seperti dompet,tas, bunga, setelah mendapatkan pendampingan mereka bisa mengembangkan produk limbah plastik menjadi produk seperti Kap Lampu dan Box.

2. Fasilitas Informasi dan Akses Pasar Ekspor

Dilaksanakan dengan pelatihan akses dan survey pasar melalui internet yang bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Export Indonesia (BPPEI) Kementrian Perdagangan RI dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang , yang di bagi dalam 2 Tahap, yaitu pada bulan Februari dan bulan Maret 2019.

2). Indikator Kinerja Utama diperoleh berdasarkan (IKU) pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hasil perhitungan capaian indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 6
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Uraian	Target IKU	Realisasi IKU	Target IKU	Realisasi IKU	Keterangan	
		2018	2018	2019	2019		
1	Jumlah Komoditi Ekspor	27	30	29	30	Tercapai	

- Capaian jumlah komoditi ekspor Tahun 2019 mencapai 30 komoditi sama seperti tahun 2018 yaitu 30 Komoditi.
- Keberhasilan tersebut dicapai dengan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat kepada para industri kecil menengah untuk memotivasi pemasaran produk ke luar negeri melalui berbagai kegiatan seperti pameran, pelatihan dan temu bisnis dengan stakeholder terkait (atase perdagangan, indonesian trade promotion center (itpc) dan free trade agreement (fta center).
- perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut: realisasi kinerja pada tahun 2018 adalah 30 komoditi, sedangkan pada tahun 2019 tetap 30 komoditi. hal ini disebabkan ada beberapa komoditi yang dulu ekspor namun pada tahun 2019 tidak ada permintaan pasar, namun demikian ada juga komoditi baru di tahun 2019 seperti :
 - 1) makanan balita
 - 2) bumbu
 - 3) zeolite
 - 4) serum darah beruk (bukan untuk komersil)
 - 5) jaringan otak beku (bukan untuk komersil)
 - 6) makanan ternak / cacing kering
 - 7) kecap
 - 8) gula semut
 - 9) bingkai
 - 10) arang kelapa

sedangkan untuk komoditi tahun 2018 yang <u>tidak ekspor</u> tahun 2019 antara lain:

- 1) kosmetik
- 2) minyak atsiri
- 3) live coral
- 4) ikan hias
- 5) beruk hidup
- 6) aksesories
- 7) kopi
- 8) matrial bangunan
- 9) bordir
- 10)kain ecoprint

komoditi disini dikelompokan berdasarkan kode hs yang digunakan sebagai standar internasional atas penamaan dan penomoran untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya. Sedangkan dari jumlah eksportir pada tahun 2019 = 35 perusahaan, terdiri dari 20 perusahaan / industri menengah dan besar sedangkan 15 dari perusahaan perorangan / industri kecil.

• Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja, adalah berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI pada Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional, Ikut berpartisipasi pada kegiatan pameran bertaraf internasional untuk mempromosikan produk-produk Kota Bogor, seperti pameran inacraft dan trade expo indonesia (TEI) setiap tahun, Peningkatan sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan pelatihan bagi ikm kota bogor bekerjasama dengan badan pendidikan dan pelatihan ekspor nasional di bawah Kementerian Perdagangan RI guna memotivasi IKM berani bersaing pada pasar global.

• Untuk angka realisasi ekspor Kota Bogor tahun 2019 sebesar usd 95.671.969.07, turun sekitar 3.63% atau sekitar usd 3.609.555.56 dari tahun 2018 yang mencapai angka sebesar usd 99.283.771.63, dikarenakan adanya penurunan nilai ekpor yang signifikan dari komoditi ban.

2). Akuntabilitas Keuangan

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, dilaksanakan oleh UPTD Metrologi melalui Pelayanan Tera dan Tera Ulang , dengan penjabaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
4	PENDAPATAN	
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	174.000.000,00
412	Hasil Retribusi Daerah	174.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	174.000.000,00

2. Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (APBD 2019) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran		
5	BELANJA			
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.695.102.774,00		
511	Belanja Pegawai	9.695.102.774,00		
52	BELANJA LANGSUNG	8.464.250.065,00		
521	Belanja Pegawai	766.050.000,00		
522	Belanja Barang dan Jasa	4.191.850.065,00		
523	Belanja Modal	3.506.350.000,00		
	JUMLAH BELANJA	18.159.352.839,00		

b. Target Realisasi Anggaran

Target Realisasai Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

PERIODE: 01 JANUARI 2019 – 31 DESEMBER 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	174.000.000,00	150.887.600,00	(23.112.400,00)	86,72
412	Hasil Retribusi Daerah	174.000.000,00	150.887.600,00	(23. 12.400,00)	86,72
	JUMLAH PENDAPATAN	174.000.000,00	150.887.600,00	23.112.400,00	86,72
5	BELANJA				
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.695.102.774,00	8.870.859.602,00	(824.243.172,00)	91,50
511	Belanja Pegawai	9.695.102.774,00	8.870.859.602,00	(824.243.172,00)	91,50
52	BELANJA LANGSUNG	8.464.250.065,00	7.798.542.461,00	(665.707.604,00)	92,14
521	Belanja Pegawai	766.050.000,00	707.650.000,00	(58.400.000,00)	92,38
522	Belanja Barang dan Jasa	4.191.850.065,00	3.789.676.923,00	(402.173.142,00)	90,41
523	Belanja Modal	3.506.350.000,00	3.301.215.538,00	(205.134.462,00)	94,15
	JUMLAH BELANJA	18.159.352.839,00	16.669.402.063,00	(1.489.950.776,00)	91,80
	SURPLUS / DEFISIT	(17.985.352.839,00)	(16.518.514.463,00)	1.466.838.376,00	91,84

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor dalam mendukung pencapaian misi dan tujuan Pemerintah Kota Bogor, serta dalam rangka perwujudan good governance. LKPJ ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan pada Tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan beserta efektivitas dan efisiensi kebijakan yang ditetapkan.Berdasarkan hasil program dan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam BAB III maka bisa disimpulkan bahwa dalam pencapaian seluruh Kinerja Sasaran Strategisnya, kecuali indikator predikat LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang belum disajikan, mampu dilaksanakan dengan predikat sangat berhasil.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mancapai sasaran yang dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya komitmen dari Pemerintah Kota Bogor sendiri, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan, serta pelaku usahaindustrikecil dan menengah.S

elain itu didorong juga oleh faktor adanya koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya disamping adanya kepedulian dan antusiasme binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bogor, Juni 2020